



ZERO TRUK 'OBESITAS' DI 2023 BELUM JELAS

Kebijakan Zero Odol (Over Dimension Over Load) alias larangan operasi kendaraan 'obesitas' rencananya akan diimplementasikan pada 1 Januari 2023. DPR pun menagih kesiapan dan keseriusan pemerintah yang dinilai masih 'mentah'. Padahal kerugian negara akibat truk kelebihan kapasitas yang wara-wiri menyentuh Rp 43,45 triliun tiap tahunnya. Belum lagi nyawa yang melayang akibat kecelakaan truk ODOL di jalan raya. Sayangnya, Kementerian Perhubungan malah mengaku sangat kesulitan untuk memberantas truk kebanyakan muatan ini. Dikatakan, truk obesitas bagaikan tidak mempan ditilang. Salah satu pemicunya karena jumlah denda masih sangat kecil dari total keuntungannya. Walhasil, dari catatan pengawasan barang di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran angkutan barang. Paling tinggi klasifikasi daya angkut berlebih sebanyak 56,2%, diikuti pelanggaran dokumen, tata cara muat, dimensi dan persyaratan teknis. Duh!

(Baca Hal 11)

DENDA TRUK ODOL



Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 307, disebutkan bahwa sanksi bagi truk ODOL (over dimension over loading) adalah pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda maksimal Rp 500 ribu.

KERUGIAN NEGARA



Akibat truk ODOL (Over Dimension dan Over Loading) negara merugi hingga Rp 43 triliun/tahun

Government (Hal.2)
Meski UMP Sudah Digatedok, Pengusaha Pede Menangkan Gugatan ke MA

MENGENAL KELAS JALAN YANG BISA DILEWATI TRUK

Kelas Jalan	Fungsi Jalan	Dimensi Kendaraan Maksimum			Muatan Sumbu Terberat (Ton)
		Lebar (m)	Panjang (m)	Tinggi (m)	
I	Arteri, Kolektor	2,5	18	4,2	10
II	Arteri, Kolektor, Local, Lingkungan	2,5	12	4,2	8
III	Arteri, Kolektor, Local, Lingkungan	2,1	9	3,5	8
Khusus	Arteri	> 2,5	> 18	4,2	> 10

Sumber :
UU no. 22 tahun 2009 no 19

Meski UMP Sudah Digatedok, Pengusaha Pede Menangkan Gugatan ke MA

JAKARTA - Hingga saat ini sudah ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Meski demikian kalangan pengusaha optimistis memenangkan gugatan di MA.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengajukan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan adanya dualisme hukum terkait penetapan upah minimum dapat mengurangi kepercayaan investor dan merugikan pelaku industri. Harusnya penetapan upah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi turunan UU Cipta Kerja.

"Saya nggak mau cawe-cawe mengenai UMP karena sudah ada bipartit, dewan pengupahan. Waktu teman-teman dari asosiasi datang mau melakukan uji materi, ya kami mendukung karena kami melihatnya dari sisi hukumnya bahwa bisa terjadi ketidakpastian yang akan mempengaruhi investor dan pelaku industri, ini harus clear," kata Arsjad di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (29/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjong yakin bahwa pengusaha tidak akan kalah di MA terkait UMP. Pasalnya PP lebih tinggi dari Permenaker. "Feeling saya sih nggak mungkin kalah, feeling saya ya, karena bagaimana pun PP itu lebih tinggi dari Permenaker," kata Sarman.

Sarman menyebut PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan produk resmi pemerintah dalam menetapkan UMP dari tahun ke tahun yang telah dirundingkan bersama. Dia pun menyanggah keluarnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang disebut tidak melalui proses perundingan.

"Pemerintah membuat aturan di atas aturan. Pengusaha itu akan sangat concern apabila dasar penetapan UMP sesuai regulasi dan peraturan yang ada karena kita ingin kondisi usaha dan investasi kondusif, yang salah satunya adalah kepastian hukum," ucapnya.

"Makanya kalau Kadin dan Apindo mengajukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum. Angkanya kita kesampingkan dulu, kalau yang ditetapkan itu sesuai prosedur yang berlaku ya kita terima, tapi ini kan tidak," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan pengusaha secara resmi menggandeng kuasa hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm untuk mendaftarkan permohonan uji materi atas penetapan UMP 2023 ke MA.

Biaya perkara telah dibayarkan, tinggal menunggu proses administrasi di MA sebelum disidangkan.

33 Provinsi Buat Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengapresiasi para Gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. "Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif. Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Ida dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (29/11).

Menaker Ida mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif.

"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," terang Ida.

Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Adapun, untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022.

"Saat ini kami masih menunggu Gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimis para Gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menaker Ida menambahkan, berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi yang mencapai 9,15 persen, di mana UMP 2022 sebesar Rp 2.512.539,00 naik menjadi Rp 2.742.476,00 di tahun 2023.

Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen, di mana UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231,00 naik menjadi Rp 2.976.720,00 di tahun 2023.

Selain itu, Menaker mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP



Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Balai Kota DKI, Jakarta. (Foto-dok)

mencapai 7,50 persen di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah).

"Dengan demikian, maka maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini, yaitu sebagai jalan tengah bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam

penetapan upah minimum benar-benar tercapai," jelas Ida.

"Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," pungkasnya. (wid,ist,ant/dya)

DAFTAR UMP 2023 DI INDONESIA

Provinsi	Kenaikan UMP	Nominal UMP 2023
Aceh	7.8 %	3.40 Juta
Sumatera Utara	7.45 %	2.71 Juta
Sumatera Barat	9.15 %	2.74 Juta
Sumatera Selatan	8.26 %	3.40 Juta
Riau	8.61 %	3.19 Juta
Jambi	9.04 %	2.94 Juta
Bengkulu	8.1 %	2.41 Juta
Lampung	7.89 %	2.63 Juta
Bangka Belitung	7.15 %	3.49 Juta
Kep.Riau	7.51 %	3.27 Juta
DKI Jakarta	5.6 %	4.90 Juta
Jawa Barat	7.88 %	1.98 Juta
Jawa Timur	7.8 %	2.04 Juta
Jawa Tengah	8.01 %	1.95 Juta
DIY	7.65 %	1.98 Juta
Banten	6.4 %	2.66 Juta
Bali	7.81 %	2.71 Juta
NTB	7.44 %	2.37 Juta
Kalimantan Barat	7.16 %	2.60 Juta
Kalimantan Tengah	8.84 %	3.18 Juta
Kalimantan Selatan	8.38 %	3.14 Juta
Kalimantan Utara	7.79 %	3.25 Juta
Kalimantan Timur	6.2 %	3.20 Juta
Sulawesi Utara	5.24 %	3.48 Juta
Sulawesi Tengah	8.73 %	2.59 Juta
Sulawesi Selatan	6.96 %	3.38 Juta
Sulawesi Tenggara	7.1 %	2.75 Juta
Gorontalo	6.74 %	2.98 Juta
Sulawesi Barat	7.20 %	2.87 Juta
Maluku Utara	4 %	2.97 Juta
Papua Barat	2.56 %	3.28 Juta

ASOSIASI PENGUSAHA YANG GUGAT ATURAN UMP

-  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
-  Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API),
-  Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO),
-  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)
-  Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI),
-  Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI),
-  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),
-  Himunan Penyewa dan Peritel Indonesia (HIPPINDO),
-  Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI),
-  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Perppu Pemilu Dinilai Sebagai Anomali, Kenapa?

JAKARTA— perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu, segera diterbitkan pemerintah. Paling tidak, Perppu sudah harus terbit pada akhir November 2022.

“KPU berharap, setidaknya akhir November ini Perppu Pemilu yang mengatur tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR, DPD, ataupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu segera diterbitkan,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dikutip Selasa (29/11).

Menurut Hasyim, dengan diterbitkannya Perppu Pemilu, dapat menjadi landasan hukum bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah-daerah otonom baru.

Daerah-daerah otonom baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang telah diresmikan serta Papua Barat Daya yang akan segera diresmikan pasca-RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan DPR RI pada pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, pekan lalu pemerintah pusat bersama penyelenggara pemilu dan DPR mengadakan konsinyering dalam rangka menyusun Perppu Pemilu. Adapun, melalui Perppu ini, lima poin dalam UU Pemilu akan direvisi.

Selain poin soal akomodasi pemilu di provinsi baru, Perppu ini juga merevisi aturan soal perubahan jumlah anggota DPR, penambahan jumlah dapil, penyeragaman akhir masa jabatan KPU daerah, dan pemajuan penetapan daftar calon tetap.

Sementara poin kelima—dan yang paling kontroversi—adalah dihapusnya aturan pengundian nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Poin yang merupakan akomodasi dari usul Megawati

Soekarnoputri ini ramai dikritik, utamanya oleh parpol-parpol baru.

Beberapa pakar menilai, bahwa penyusunan Perppu Pemilu merupakan langkah yang tidak masuk akal. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini, bahkan menyebut langkah tersebut sebagai sebuah anomali.

“Perppu Pemilu ini anomali,” kata Titi Angraini, dalam diskusi bertajuk “Seberapa Jauh Kemandirian Penyelenggara Pemilu Kita?,” yang tayang di kanal Youtube NET GRIT.

Menurut Titi, sesuai namanya, “perppu hendaknya diterbitkan pemerintah dan dihasilkan untuk mengatasi kegentingan/ kedaruratan”. Namun, imbuhnya, rapat konsinyering yang dihelat beberapa kali tersebut justru menegaskan tidak ada kegentingan berarti yang menuntut terbitnya perppu secara cepat.

Penyusunan Tak Libatkan Rakyat

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal tidak adanya partisipasi masyarakat sipil. Semua pihak yang terlibat dalam konsinyering tersebut merupakan aktor negara. Apalagi, penyusunan itu juga didominasi anggota DPR, yang dihuni anggota-anggota partai politik yang seluruhnya akan jadi peserta Pemilu 2024. “Kalau sempat membahas bersama, kenapa tidak revisi Undang-Undang Pemilu sekalian?” ujar pakar kepemiluan Universitas Indonesia ini.

Selain itu, Titi juga menggarisbawahi bahwa perppu ini justru banyak mengakomodir masuknya berbagai kepentingan di luar penataan



Simulasi pencoblosan saat Pemilu 2024. (Foto-dok)

dapil dan alokasi kursi imbas pemekaran provinsi di Papua. Ia pun menyimpulkan bahwa proses pembuatan perppu ini sebagai preseden buruk dalam kacamata hukum.

“Makanya saya pikir, saya yang salah belajar hukum, atau ada peristiwa hukum luar biasa di negara kita yang nomenklaturnya betul-betul saya tidak pahami? Tapi, sebetulnya ini preseden buruk jika kita ingin bicara pemilu sebagai sebuah tertib hukum,” ujarnya.

Selain dianggap sebagai anomali, Titi juga menyoroti betapa perppu ini sama sekali tidak menyentuh akar masalah pada isu-isu yang mendesak. Semisal, soal penyeragaman masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, yang justru ia anggap problematik.

Diakuinya, hal itu memang mendesak. Namun, pemilihan tahun 2023 sebagai awal penyeragaman masa jabatan dianggap tak sesuai dengan tujuan utama, yakni meniadakan rekrutmen di tengah tahapan pemilu. Oleh karenanya, ia menyalahkan para pihak yang terlibat dalam revisi UU Pemilu ini tak menjadikan momentum revisi saat ini sebagai momentum perbaikan mendasar. “Kalau kita secara serius ingin membenahi penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, momentumnya itu saat ini,” jelas Titi.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI

Mardani Ali Sera menyebut pengisian kekosongan jabatan kepala kepala daerah dengan penjabat (Pj) dapat menjadi peluang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di suatu daerah.

“Ini ada jendela kita memperbaiki kualitas good governance di daerah karena yang terpilih adalah mereka-mereka dari ASN, baik pratama maupun madya,” kata Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Netralitas Penjabat Kepala Daerah Diuji pada Pemilu 2024” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Selain dinilai memiliki kapasitas yang baik karena meniti karir dari bawah, Mardani menganggap para pimpinan tinggi madya maupun pratama tidak memiliki utang kepada partai politik yang mengusungnya maupun DPRD ketika diangkat menjadi Pj kepala daerah, sehingga dapat lebih optimal bekerja untuk rakyat.

“Nah, mereka ini mestinya tidak berpikir kepada siapa yang angkat mereka, tapi berpikir ini amanah untuk menunjukkan betapa kalangan ASN dan birokrat serta birokrasi kita itu mampu menjadi contoh teladan,” ujarnya. Mardani juga mendorong agar Pj kepala daerah dapat menunjang transparansi kinerjanya dan melakukan terobosan-terobosan dalam tongkat estafet kepemimpinan nya itu. (wid,rls,ist/dya)



Gonjang-ganjing Bantuan 680 Ribu Rice Cooker

JAKARTA - Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan bantuan 680.000 penanak nasi atau rice cooker listrik sempat mencuat. Namun, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyatakan rencana tersebut masih belum final.

Awalnya direncanakan bantuan rice cooker listrik senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan dianggarkan pada 2023. Namun, sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan lebih lanjut. Arifin mengatakan kementeriaannya masih melakukan kajian intensif berkaitan dengan program bantuan penanak nasi listrik (BPNL) itu bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Itu masih perlu pendalaman karena juga melibatkan kementerian lembaga yang lain," kata Arifin saat di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari tempo.co, Selasa (29/11/2022).

Dengan tegas, Arifin juga mengatakan bahwa kementeriaannya belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program BPNL

ini pada tahun depan. Bahkan, sekali lagi dia menandakan rencana itu masih belum final dibahas di internal Kementerian ESDM. "Anggarannya belum ada," kata dia.

Pada hal, awalnya Kementerian ESDM bakal menyalurkan rice cooker listrik sebanyak 680.000 unit lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian tahun depan. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Adapun, pengurangan volume LPG 3 kilogram mencapai 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar US\$26,88 juta. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik diharapkan menyentuh di angka 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW.

Plt. Sekretaris Ditjen Gatrik, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan program itu juga diharapkan dapat mengerek rasio elektrifikasi di dalam negeri. "Kementerian ESDM tengah menyiapkan kegiatan distribusi dari e-cooking dengan tujuan pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya masak," kata Ida saat Forum Diskusi Publik yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Jumat 25 November 2022 lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membagikan 680 ribu unit rice cooker kini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih.

"Saya kira pembagian rice cooker ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi kepada masyarakat terutama golongan ke bawah terkait peralatan memasak mereka. Dengan demikian, masyarakat juga bisa menjadi lebih mudah dalam memasak nasi tidak lagi manual," ujar Mamit saat dihubungi pada Selasa (29/11/2022).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dampak dari pemakaian listrik setelah rice cooker dibagikan. Menurutnya, pembagian bantuan itu tidak akan terlalu banyak, mengingat listrik untuk rice cooker ini konsumsinya tidak terlalu besar. Tetapi akan ada peningkatan konsumsi. Menurut dia itu tidak bisa dipungkiri karena jumlahnya banyak sekali 680 ribu unit. "Tetapi ini semua akan baru wacana. Masih menunggu anggarannya terlebih dahulu,"



Ilustrasi Rice Cooker

tutor Mamit.

Sementara bagi masyarakat, dia menilai, program electric lifestyle ini bisa menjadi upaya peningkatan konsumsi listrik tidak hanya dari pemberian rice cooker gratis. Mamit mencontohkan, dengan program kendaraan listrik. "Pemerintah harus bisa memberikan insentif agar kendaraan listrik menjadi terjangkau, infrastruktur semakin banyak dan model menjadi lebih menarik," ucap Mamit.

Sebelumnya, Sub-Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Edi Pratikno menjelaskan program rice cooker gratis diharapkan dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak.

"Penanak nasi tersebut akan diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM, yang tentu datanya mengacu pada Kementerian Sosial," kata dia dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022.

Ia menjelaskan, rice cooker listrik akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM pada 2023. Paket program yang disediakan pemerintah adalah Rp 500 ribu per keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurutnya, penerima tidak memerlukan penambahan daya.

Adapun target KPM penerima paket rice cooker listrik adalah kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang ingin menerima bantuan, perlu validasi dari kepala

desa. Hal yang sama berlaku pada pengguna LPG 3 kilogram. "Sebab, berdasarkan survei PLN, pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilogram," tutur Edi.

Terkait dengan rencana bantuan rice cooker dengan tujuan untuk mengurangi subsidi gas LPG, lantas berapa besaran subsidi pemerintah pada gas LPG. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, besaran subsidi untuk LPG 3 kg atau dikenal dengan gas tabung melon pertahun mencapai Rp 33.750.

Nicke menjelaskan, LPG yang dijual Pertamina 93% disubsidi. Dia bilang, subsidi per kg untuk LPG itu sebesar Rp 11.250. "Faktanya hari ini LPG terjual 93% disubsidi. Subsidinya berapa, 11.250 per kg," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, dikutip dari detik.com.

Dengan demikian, total subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 33.750. "Jadi sekali nenteng itu tabung 3 kg, itu subsidi dari pemerintah itu Rp 33.750," tambahnya.

Sementara, saat ini harga LPG 3 kg dijual di kisaran Rp 21 ribu per tabung. Nicke berharap, penyaluran LPG 3 kg ini tepat sasaran. Ia berharap, pemerintah mendetailkan kriteria penerima LPG 3 kg.

"Jadi mohon, ini juga harus tepat sasaran. Kalau sampai 93%, kan tidak 93% masyarakat Indonesia itu kurang mampu dan jualan warteg. Jadi ini memang yang tadi saya sepakat kita lakukan monitoring, dan kami minta juga kepada pemerintah lebih mendetilkan lagi kriteria, pengguna," ujarnya. (lut/ist/dya)



Kementerian ESDM tengah menyiapkan kegiatan distribusi dari e-cooking dengan tujuan pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya masak,"

IDA NURYATIN FINAHARI
Plt. Sekretaris Ditjen Gatrik



Resmikan AMN, Jokowi Berharap Bangun Kerukunan Mahasiswa Antardaerah

SURABAYA – Presiden, Joko Widodo, berharap Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) mampu membangun kerukunan mahasiswa antardaerah. Untuk itu, Presiden juga berencana untuk membangun AMN di Makassar dan Manado. Hal itu disampaikan saat meresmikan AMN di Surabaya, Selasa (29/11/2022).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku senang karena rasa optimisme tampak dari wajah 410 mahasiswa yang terdaftar di AMN Surabaya. “Wajahnya kelihatan kalau orang Jawa bilang semringah, cerah, ceria, dan memperlihatkan optimisme yang tinggi. Di sini ada 410 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbaur menjadi satu,” ujar Presiden dikutip dari laman kepresidenan.

Presiden yang akrab dengan sapaan Jokowi ini menjelaskan, usulan awal pembangunan AMN berasal dari tokoh Papua yang menaruh perhatian terhadap gesekan antarmahasiswa yang masih terjadi di sejumlah daerah, utamanya di kota-kota pendidikan. Hal tersebut, menurut Presiden, disebabkan masing-masing provinsi memiliki asrama tersendiri di daerah.

“Papua punya sendiri asrama,



Keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan artinya gampang diadu domba. Enggak, ini adalah kekuatan kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun, dan kita bisa bersatu,”

JOKO WIDODO
Presiden RI



nanti dari provinsi yang lain punya asrama sendiri, provinsi lain punya asrama sendiri, sehingga kita tidak saling mengenal,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Presiden menyetujui usulan pembangunan AMN di sejumlah provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk membangun kerukunan mahasiswa antardaerah. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman suku yang merupakan kekuatan bangsa dan negara.

“Keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan artinya gampang diadu domba. Enggak, ini adalah kekuatan kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun, dan kita bisa bersatu,” tambahnya.

Presiden Jokowi menambahkan, dengan adanya AMN, mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat saling mengenal dan belajar mengenai budaya dari masing-masing daerah. Selain itu, mahasiswa yang tinggal di AMN juga diberikan pembekalan terkait wawasan kebangsaan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa.

“Inilah tujuan dari asrama mahasiswa nusantara, selain tentu saja para mahasiswa diberikan beasiswa, tapi yang paling penting kita bisa saling mengenal,” kata Presiden.

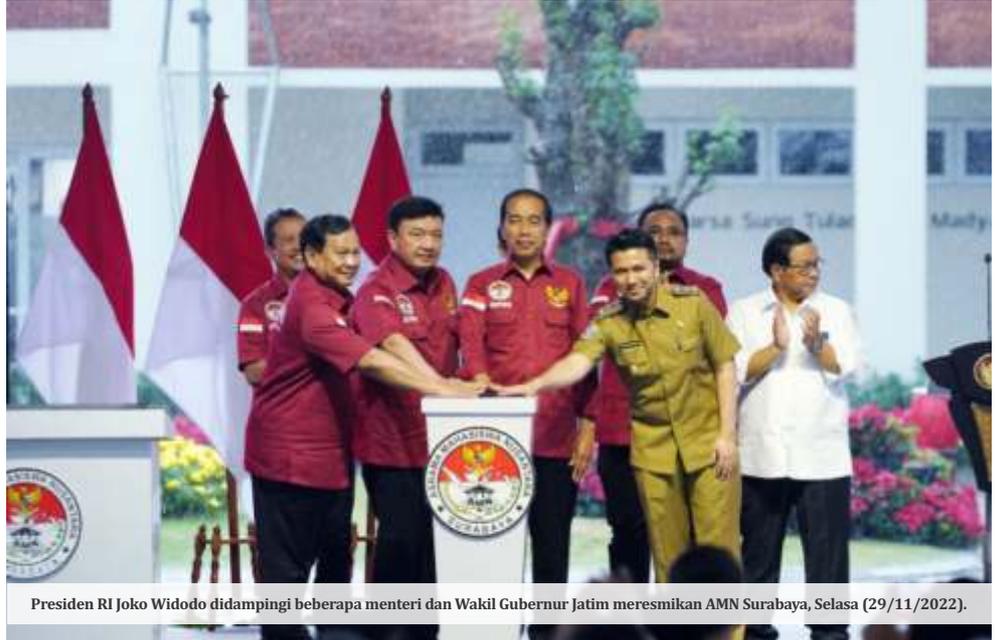
Selain peresmian AMN Surabaya, Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan AMN Makassar dan Manado. Dalam dialog bersama para pimpinan daerah melalui konferensi video, Presiden mengatakan akan menginstruksikan menteri terkait untuk segera memulai pembangunan AMN di Makassar dan Manado.

“Berarti di Makassar bisa segera dimulai. Saya kira di Manado juga bisa (dimulai). Inshaallah saya nanti juga perintahkan menteri untuk segera dimulai,” ucapnya.

Setelah memberikan sambutan dan meresmikan AMN Surabaya, Presiden Jokowi meninjau sejumlah kegiatan di asrama tersebut. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di ruang berdiskusi, diharapkan para mahasiswa tidak saja memiliki kemampuan akademis, tapi juga mulai menanamkan jiwa wirausaha.

Beberapa kegiatan wirausaha yang ada di asrama tersebut antara lain, barbershop, penyablonan kaos, ternak lele dengan metode bioflok, pembuatan tas noken Papua, serta penjualan makanan dan minuman yang diproduksi oleh mahasiswa yang tinggal di asrama.

Saat melihat tiga mahasiswa yang



Presiden RI Joko Widodo didampingi beberapa menteri dan Wakil Gubernur Jatim meresmikan AMN Surabaya, Selasa (29/11/2022).

tengah bersiap memotong rambut, Presiden bertanya apakah benar dapat memotong rambut. “Bisa,” jawab ketiga mahasiswa itu. “Coba, saya mau lihat,” ucap Presiden.

Ketiga mahasiswa itu pun dengan cekatan memotong rambut para pelanggannya. “Oh iya beneran bisa motong. Makasih ya,” kata Presiden.

Setiap kegiatan kewirausahaan yang ada diperhatikan secara detail oleh Presiden, seperti saat melihat makanan dan minuman. Presiden mengingatkan agar mengemasnya dengan baik, karena kesan pertama melihat makanan dan minuman sangat penting bagi seorang pembeli. “Packaging-nya harus bagus ya,” ucap Presiden.

Ketika melihat minuman kopi jelly, Presiden menanyakan berapa harganya dan bagaimana memasarkannya. “Ini Rp8.000 per botol, dibeli oleh mahasiswa,” kata mahasiswa yang tengah berjualan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat bertanya pada para mahasiswa apakah ada yang kenal dengan anggota rombongannya. “Ini siapa?” tanya Presiden. “Pak Nadiem,” jawab mahasiswa serempak. Presiden pun menanyakan jabatan Nadiem. “Mendikbudristek,” jawab mahasiswa.

Setelah Nadiem, giliran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditanyakan kepada mahasiswa. “Kalau ini siapa?” tanya Presiden. “Pak Prabowo,” jawab mahasiswa. Ketika Presiden bertanya jabatannya apa, para mahasiswa malah memfoto Prabowo. Tak lama baru dijawab, para mahasiswa itu serempak, “Menteri Pertahanan.”

Selain menteri, Presiden juga memperkenalkan Billy Mambrasar. “Kalau ini siapa?” tanya Presiden. “Kak Billy,” ucap sebagian mahasiswa.

Presiden pun menjelaskan bahwa

Billy berasal dari Papua dan merupakan alumni dari perguruan tinggi ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Presiden menjelaskan bahwa dirinya mengajak Billy ikut dalam kunjungan tersebut agar bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus maju.

“Jadi saya mengajak Billy, agar semuanya memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk maju. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, yang penting punya semangat dan kemauan,” ujar Presiden. Presiden pun menjelaskan saat ini, Billy adalah Staf Khusus Presiden.

Billy menjelaskan bahwa dia juga dapat kuliah karena mendapat beasiswa, sama seperti adik-adik,” kata Billy. Pendidikan S1 Billy didapat dari ITB, dua gelar S2 diperolehnya dari Universitas Oxford di Inggris dan Universitas Harvard di Amerika Serikat.

“Saya akan melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Pennsylvania Amerika Serikat yang akan dimulai pada Januari 2023 melalui beasiswa LPDP,” kata Billy.

Lebih lanjut Billy pun memberikan kiat-kiat keberhasilannya. “Kuncinya adalah bekerja keras, jangan malu-malu membuka diri kepada kebudayaan berbeda, jangan membuang-buang waktu. Taruh foto orang tua di kamar sebagai sumber motivasi,” ucap Billy.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (lut/ist/dya)



PAULA VERHOEVEN:

Ngelatih Kesabaran



PAULA Verhoeven baru saja pulang dari Tanah Suci usai menjalankan ibadah Umrah bersama kedua anaknya, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago.

Lewat akun Instagram pribadinya, istri Baim Wong ini pun mengungkapkan bagaimana rasanya beribadah Umrah sambil membawa kedua putra kecilnya.

Dalam foto yang diunggahnya, Paula terlihat memakai hijab seraya memeluk putranya yang tengah duduk di dalam kereta dorong bayi.

“MasyaAllah Tabarakallah. Umroh bawa anak itu pengalaman yang luar biasa, ngelatih kesabaran. MasyaAllah lancar dan dipermudah Allah,” tulis

*Baim
Wong &
Paula
Verhoeven*



model berusia 35 tahun ini.

Kala ditemui di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini, Paula mengaku tak memiliki doa spesifik ketika berada di Tanah Suci.

Namun, perempuan berdarah Belanda-Indonesia ini tak lupa memanjatkan doa untuk keluarga dan anak-anaknya.

Penampilan Paula saat beribadah di Mekkah pun menuai pujian dari para warganet. Tak sedikit dari mereka yang memuji kecantikannya saat memakai hijab dan baju muslim syar'i.

“Cantiknya MasyaAllah mama Pau (Paula, red). Sehat dan bahagia selalu mama Pau,” komentar salah seorang warganet.

Di unggahan lainnya, artis kelahiran Semarang, 18 September 1987 ini tampak mengenakan hijab serta gamis berwarna hitam.

Model yang memulai kariernya dari ajang pemilihan Gadis Sampul 2001 ini turut menuliskan kalimat-kalimat bijak, sebagai pengingat bagi dirinya serta para pengikutnya yang ada di Instagram.

“Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh maka berarti akan mengundang kebahagiaan,” tulis pelakon Diva di film Supernova (2014) ini.

Jadi jauh lebih sabar ya sekarang?

Paula Verhoeven, lahir di Semarang, 18 September 1987 dari pasangan Eddy Verhoeven dan Herlina T. Verhoeven. Ayahnya adalah seor

ang keturunan Tionghoa - Belanda. Sementara ibunya adalah orang Jawa asli Semarang.

Paula menghabiskan masa kecilnya di Semarang, ia di sana sampai SMA. Usai menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya, Paula hijrah ke Jakarta.

Paula mengawali karirnya sebagai model sejak ia masih tinggal di Semarang. Kepindahannya ke Jakarta membuat karirnya makin menanjak dan bahkan ia bisa menembus dunia model internasional.

Sebagai model, Paula sempat memenangi banyak ajang. Ia terpilih sebagai juara pertama Elite Model Look pada 2003.

Awalnya, Paula hanya ingin melanjutkan kuliah saja di Jakarta. Ia adalah mahasiswi London School of Public Relations di Londong School angkatan tahun 2005. Paula menyelesaikan kuliahnya tepat empat tahun, dan ia lulus pada tahun 2009.

Paula pernah menjadi juara 1 Elite Model Look pada tahun 2003. Ia juga pernah menjadi juara harapan Abang None Jakarta pada tahun 2006. Dan ia juga pernah jadi juara 1 Face of Asia pada tahun 2012.

Setelah 3 tahun, Paula menjadi juara harapan Abang None Jakarta. Ketika berusia 25 tahun, Paula didapuk sebagai juara pertama Face of Asia

Karirnya di dunia modelling semakin melebar setelah ia kerap menjadi model di Singapura. Bahkan, di awal tahun 2014 lalu ia sempat dikontrak agensi di Milan selama tiga bulan.

Namun karena tertarik untuk bergabung dengan film SUPERNOVA, Paula pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di dunia akting. Di film ini ia memerankan sosok Diva, model yang dunianya tak jauh beda dengan kesehariannya (berbagai sumber)



PENGERTIAN KERACUNAN MAKANAN



KERACUNAN makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi.

Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan.

Gejala keracunan makanan dapat terlihat setelah beberapa menit, jam, atau hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kecepatannya tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya.

Umumnya, keracunan makanan bukanlah kondisi yang serius dan dapat sembuh dengan sendirinya.

Namun, kondisi ini terkadang juga dapat membahayakan dan membutuhkan penanganan khusus oleh dokter.

CIRI-CIRI KERACUNAN MAKANAN

Gejala yang muncul akibat keracunan makanan bervariasi, tergantung pada zat yang mengkontaminasi makanan yang dikonsumsi. Gejala yang sering muncul antara lain diare, mual, muntah, kram perut, sakit perut melilit, dan sakit kepala.

PENYEBAB KERACUNAN MAKANAN

Penyebab terjadinya keracunan adalah makanan yang telah terkontaminasi kuman, seperti bakteri Salmonella, atau racun, misalnya telur atau seafood mentah. Kontaminasi tersebut dapat terjadi saat makanan melalui proses awal produksi, seperti saat penanaman hingga pengiriman, atau saat sedang diproses untuk dikonsumsi.

Keracunan makanan juga bisa terjadi ketika seseorang mengonsumsi buah dan sayuran yang kotor atau tidak dicuci dengan baik atau tanaman beracun.

Pengolahan makanan beku yang tidak benar, misalnya sembarangan mencairkan daging sapi atau ayam, juga bisa menyebabkan keracunan makanan.

CARA MENGATASI KERACUNAN MAKANAN

Mencegah dehidrasi adalah pertolongan pertama untuk mengatasi keracunan makanan. Untuk mencegah dehidrasi penderita dapat minum air putih sedikit demi sedikit, serta menghindari makanan yang merangsang, seperti makanan pedas atau terlalu manis untuk mencegah muntah.

Jangan minum obat antimuntah maupun antidiare tanpa anjuran dari dokter.

EFEK KERACUNAN MAKANAN

Keracunan makanan dapat menyebabkan beberapa komplikasi, dari yang ringan hingga yang lebih serius. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah dehidrasi. Sedangkan komplikasi yang lebih serius salah satunya adalah sindrom hemolitik uremik.

PENCEGAHAN KERACUNAN MAKANAN

Membuat dan juga mengonsumsi makanan dengan bersih serta sehat menjadi cara untuk mencegah keracunan makanan yang paling efektif. Selain itu, jenis makanan tertentu yang belum dipastikan keamanannya juga sebaiknya dihindari.

Hindari Mengonsumsi Obat Tanpa Resep Dokter

Diare dan muntah pada keracunan makanan adalah proses alami tubuh mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Pada saat mengalami

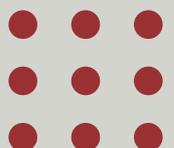
keracunan makanan sebaiknya hindari obat antidiare seperti loperamide. Hal itu karena mengonsumsi obat diare sebenarnya dapat memperparah gejala keracunan. Selain itu gejala diare akibat keracunan makanan tidak selalu memerlukan pengobatan dengan antibiotik. Ini karena antibiotik tidak mengobati keracunan makanan yang disebabkan oleh virus atau parasit. Apabila gejala tersebut memerlukan pengobatan dengan antibiotik maka sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

Konsumsi Jahe

Untuk meredakan mual dan sakit perut, cobalah minum air jahe. Air jahe memiliki efek menenangkan untuk saluran pencernaan. Selain jahe, keracunan makanan juga bisa diatasi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yoghurt.

Cukupi Waktu Istirahat

Ketika keracunan makanan, beristirahatlah yang cukup agar sistem kekebalan tubuh terjaga dengan baik. Sistem kekebalan tubuh sangat diperlukan untuk melawan bakteri penyebab keracunan. Selain itu gejala keracunan makanan juga membuat tubuh terasa lemas sehingga perlu banyak istirahat untuk memulihkan energi anda. (Berbagai Sumber)



OPPO Indonesia Buka Pendaftaran Bagi Peminat Pad Air



OPPO Indonesia mulai hari ini membuka pendaftaran minat konsumen OPPO Pad Air yang dipesan melalui website resminya.

Dikutip dari siaran resminya, Senin, lewat pendaftaran minat ini, konsumen akan mendapatkan keuntungan menjadi orang pertama yang akan menerima informasi terbaru terutama saat OPPO Pad Air sudah mulai dipesan secara resmi.

"Untuk menjawab antusiasme yang sangat tinggi, kami membuka situs pendaftaran minat kepada konsumen yang tertarik dengan OPPO Pad Air. Tablet pertama OPPO ini akan menjadi game changer dengan menawarkan pengalaman hiburan yang belum pernah ada sebelumnya pada perangkat tablet," ujar Chief Marketing Officer OPPO Indonesia

Patrick Owen.

"OPPO berupaya memperkenalkan ekosistem cerdas dan interkoneksi seamless antar perangkat OPPO yang ditujukan untuk penggunaan multi perangkat yang lancar dan mudah dalam mendukung produktifitas penggunaannya," lanjutnya.

OPPO Pad Air hadir dilengkapi dengan Layar Besar 10,36 inci dengan Resolusi 2K dengan sertifikasi TÜV Rheinland untuk perlindungan mata terhadap cahaya biru.

Dengan ini, layar OPPO Pad Air mampu menghasilkan gambar lebih jelas dan grafis lebih halus, namun juga dapat mengurangi kelelahan mata apabila menatap layar tablet dalam waktu yang cukup lama.

Tidak hanya unggul dalam visual, OPPO Pad Air juga dilengkapi 4

speaker simetris dengan dukungan Dolby Atmos untuk menghadirkan audio berkualitas tinggi dengan tingkat kejernihan suara yang menghadirkan pengalaman sinema dalam gengaman.

Di sisi ketahanan daya baterai, OPPO Pad Air dilengkapi baterai besar berkapasitas 7.100 mAh. Sehingga dapat digunakan menonton resolusi HD 1080P video hingga 12 jam, conference call di aplikasi Zoom selama 15 jam, atau membaca e-book 16 jam tanpa henti.

Baterai besar ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas konsumen saat bekerja, menikmati hiburan, hingga kelas online.

OPPO Pad Air hadir menawarkan paket lengkap pengalaman hiburan dan produktivitas tingkat tinggi. OPPO

pun akan segera membuka pemesanan OPPO Pad Air pada awal bulan Desember 2022 mendatang.

OPPO menduduki peringkat pertama untuk merk yang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia pada kuartal ketiga 2022 versi International Data Corporation (IDC).

Merk itu pada kuartal ketiga 2022 memiliki pangsa pasar sebesar 22,9 persen, sementara pengiriman sebanyak 1,9 juta unit di Indonesia.

Berdasarkan data IDC, OPPO kuat dalam segmen menengah ke bawah antara lain melalui model A57 dan A16.

Sementara model lainnya, Reno8, membantu meningkatkan pengiriman ponsel kelas menengah OPPO sebesar 44,1 persen dari total pengiriman mereka pada kuartal ketiga 2022.

Reno8 versi 5G juga mendorong pangsa OPPO untuk segmen 5G Indonesia menjadi 19,1 persen pada kuartal ketiga 2022 dari 6,5 persen pada kuartal ketiga 2021 (Ant)



TANDA-TANDA MATA MINUS PADA ANAK YANG JARANG DIKETAHUI



MATA minus merupakan gangguan pada indra penglihatan yang perlu diketahui sejak dini perihal tandanya, khususnya pada anak-anak.

Pasalnya, kondisi mata minus atau biasa disebut miopi pada anak ini dapat membuatnya kesulitan melihat obyek jarak jauh.

Tentu saja kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitasnya baik di rumah atau belajar di sekolah hingga bisa juga berdampak pada memorinya.

MATA MINUS PADA ANAK JARANG DIKETAHUI

Sebagai orangtua, penting sekali untuk memantau kondisi Kesehatan mata anak sejak dini.

Caranya bisa dengan melakukan pemeriksaan kesehatan mata anak ke dokter mata secara berkala.

Paling tidak kebiasaan screening ini dapat membantu orangtua dalam memantau kondisi kesehatan mata anak, hingga melihat risiko gangguan atau kondisi lainnya yang mungkin tidak menunjukkan gejala.

"Screening mata bisa dimulai dari usia berapapun. Bahkan anak yang baru lahir juga bisa di-screening karena khawatir ada penyakit bawaan mata dan lain sebagainya," kata dr. Zoraya A Feranthy, SpM, di Jakarta, belum lama ini.

Khususnya dalam hal mengenali mata minus pada anak, ada tanda-tanda awal yang dapat dicurigai.

Bila orangtua menemukan beberapa hal berikut dalam perilaku anak sehari-hari, maka orangtua perlu melakukan tindakan lebih lanjut dengan memeriksakan mata anak ke dokter.

1. Sering mengeluh sakit usai pulang sekolah

Mata minus yang tidak terkoreksi dengan baik dapat menyebabkan gejala seperti pusing hingga sakit kepala.

Biasanya gejala itu muncul akibat mata terlalu lelah mencari titik fokus agar pandangannya tidak kabur.

Kondisi tersebut lantas menimbulkan ketegangan otot pada mata, yang menjalar dan menyebabkan sakit kepala.

2. Suka menyipitkan mata

Tanda-tanda mata minus pada anak yang jarang diketahui orangtua adalah kebiasaan anak saat melihat obyek tertentu.

Anak dengan mata minus cenderung lebih suka menyipit-nyipitkan mata saat melihat obyek tertentu, terlebih jika jaraknya agak jauh. Selain itu, anak dengan mata minus juga kerap melakukan abnormal head position ketika sedang memusatkan pandangan. Seperti halnya agak memiringkan kepala saat melihat obyek tertentu.

Kebiasaan itu menurut dokter Zoraya adalah bagian dari upaya untuk memusatkan fokus pada penglihatan.

3. Kebiasaan terlalu banyak berkedip

Mata minus juga dapat menyebabkan frekuensi berkedip yang berlebihan. Kondisi itu dapat terjadi karena mata mengalami kelelahan sehingga menimbulkan ketegangan otot dan mata menjadi lebih kering dari biasanya.

Secara tidak sadar, hal tersebut juga memicu frekuensi mata anak berkedip secara berlebihan. Jika gejala mata berkedip ini berlangsung lama, tak ada salahnya untuk berobat ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

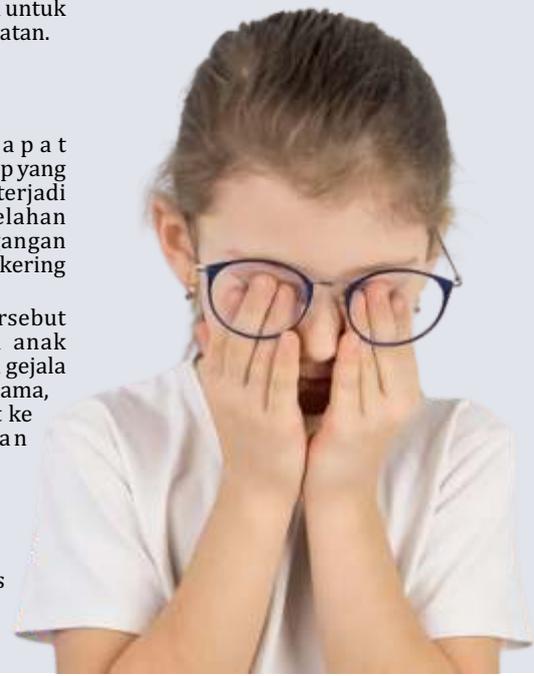
4. Memegang sesuatu dari jarak dekat

Tanda-tanda mata minus pada anak selanjutnya adalah

saat si anak suka memegang sesuatu dengan jarak dekat.

Biasanya hal itu dilakukan si kecil untuk dapat melihat lebih detail dan lebih jelas tentang barang yang dipegang itu.

Sebab jika melihatnya dari jarak jauh, pandangan matanya mulai kabur akibat miopi (Kompas)



Zero Truk 'Obesitas'(dari hal 1)

DPR RI mengkritik keras pemerintah terkait aturan truk ODOL. Anggota Komisi V DPR menagih Kementerian Perhubungan soal komitmen larangan truk obesitas atau zero ODOL di tahun 2023. DPR menilai persiapan Kemenhub kurang optimal untuk melakukan komitmen pelarangan truk obesitas ini.

Kritik keras datang dari Hamka Baco Kady. Hamka mengatakan berulang kali rapat kerja antara Kemenhub dan Komisi V soal ODOL namun tak menemui titik terang. Apa yang dipaparkan menurutnya tak pernah ada yang terealisasi.

Padahal, masalah ODOL sudah muncul sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum ada kesiapan yang konkrit untuk menjalankan larangan secara penuh di 2023. Hamka menyoroti rencana pembentukan tata aturan atau law enforcement yang sudah dijanjikan sejak tahun 2021 namun tak kunjung terlaksana.

"Ini saya ingat kan 2017, janjinya konsep di 2021 pengembangan sistem law enforcement-nya sudah ada. Pengembangan ETLE 2021 ini kayak kita belum melakukan apa-apa ini," tegas Hamka dengan nada tinggi saat rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Selasa (29/11)

Hamka pun menagih keseriusan Kemenhub untuk melakukan pelarangan truk obesitas di tahun 2023. Dia meminta ada konsistensi dari Kemenhub terhadap persoalan ini.

"Ini yang saya tagih pak konsepnya kayak apa? Apakah masih konsisten dari apa yang dipaparkan sebelumnya? Saya nggak mau bicara ulang intinya bagaimana setidaknya minimal ada pengurangan ODOL," kata Hamka.

Anggota komisi lainnya, Novita Wijayanti juga menyoroti masalah kurang optimalnya penanganan ODOL. Bahkan, Novi menyebut di daerah yang dia wakili sudah sangat sering terjadi kecelakaan yang biang keroknya adalah truk obesitas.

Bahkan, kerugiannya bukan cuma material, tapi sampai memakan korban jiwa. Dia meminta solusi konkrit dari Kemenhub perihal truk obesitas ini. "Di Brebes itu berkali-kali kecelakaan, hampir semua itu dikarenakan ODOL, karena truk kelebihan muatan. Ini belum selesai permasalahannya, nggak usah yang se-Indonesia, yang dekat aja di dapilnya saya ini, tolong cari solusi ini di satu titik aja. Ini di Brebes. Itu ODOL-nya luar biasa sekali, jalannya rusak semua," ungkap Novi di forum yang sama.

Hendro Sugiatno pun buka suara. Menurutnya, sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan kendaraan obesitas. Tindakan represif juga seringkali dilakukan. Namun, pemerintah pun harus melihat dampak ekonomi yang muncul dari permasalahan penindakan hukum. Apalagi sempat ada keluhan juga dari pengusaha.

"Upaya hukum sudah dikerjakan,

sudah ada upaya bersama dari banyak instansi keroyok masalah itu. Pendekatannya sudah represif, namun dampak ekonominya jadi pertimbangan buat kami untuk lakukan itu. Kami lakukan penekanan penindakan hukum tapi tidak dengan skala besar," jawab Hendro.

Namun Hendro menyatakan pemerintah tetap akan menegakkan zero ODOL di tahun 2023. Semua upaya akan dilakukan agar larangan truk obesitas bisa berlaku. "Targetnya masih segitu (Januari 2023), ya kita lakukan banyak upaya lah," ungkap Hendro.

Kemenhub Akui Susah Berantas

Terpisah, Kementerian Perhubungan mengaku sangat kesulitan untuk memberantas truk over dimension over load (ODOL) alias truk obesitas. Hingga kini truk obesitas masih banyak wira-wiri di jalan dan menimbulkan banyak kerugian.

Hal ini diakui oleh Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno. Menurutnya, penanganan ODOL memang harus melibatkan semua pihak, bukan cuma Kemenhub. "Memang ODOL ini permasalahan nggak mudah kita menyelesaikan tapi bukan berarti kita menyerah dengan itu. Penanganan ODOL itu harus multi lembaga multi instansi," kata Hendro dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (29/11).

Bahkan, Hendro menjelaskan truk obesitas bagaikan tidak mempan ditilang. Ada satu kasus, dia menceritakan, sebuah truk ODOL sudah berkali-kali ditilang, bahkan sudah tidak ada lagi surat-surat yang bisa disita untuk ditilang. Akhirnya, truk tersebut dipaksa untuk dikandangkan.

"Ada kasus yang kami koordinasikan dengan Korlantas, ada kendaraan ODOL itu sampai pada titik habis apa yang mau disita saat ditilang. Dari mulai ditilang SIM-nya dia jalan lagi, diambil STNK jalan lagi, lalu KIR-nya juga jalan lagi. Ujungnya ya kendaraan kita tahan," papar Hendro.

Hendro pun mengatakan denda yang dibebankan kepada pengemudi juga tidak mempan menahan pertumbuhan kendaraan obesitas. Misalnya ada kendaraan obesitas kena denda hanya Rp 100 ribu, namun dari muatannya yang berlebih pengemudi bisa dapat Rp 2 juta.

Kalaupun dibandingkan jumlah denda masih sangat kecil dari total

keuntungannya. Maka pengemudi tidak kunjung jera. "Ketika dia mengangkut kelebihan muatan lebih 2 ton dia akan untung Rp 1 juta. Kalau ditilang hanya Rp 100 ribu lebih, ya dia overload terus karena masih untung Rp 1,9 juta," ungkap Hendro.

Kemenhub sendiri, kata Hendro, tidak tinggal diam. Sudah banyak langkah hukum yang diberikan kepada kendaraan obesitas. Dari tingkat uji kir misalnya, bila ada kendaraan yang obesitas sudah pasti tidak dinyatakan lolos.

"Kami sudah berkoordinasi ke Pemda dan Korlantas bahwa apabila ada kendaraan yang over dimensi untuk tidak dululuskan kir-nya, sehingga nggak punya uji kir nggak bisa perpanjang suratnya di Samsat," jelas Hendro.

Pihaknya juga berkerja sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk menerapkan teknologi Weight In Motion (WIM) di jalan tol. Dengan begitu, truk yang obesitas tak bisa lewat.

"Kami kerja sama juga dengan BPJT, tol sudah banyak yang memasang alat itu beberapa ruas jalan dipasang alat elektronik WIM untuk bisa mendeteksi kendaraan yang over," ujar Hendro.

Bahkan, tindakan hukum juga akan diberikan kepada pemilik barang. Hal itu terjadi apabila kendaraan obesitas yang menimbulkan kecelakaan hingga memakan korban jiwa, maka pemilik barang akan ikut kena pidana.

"Sudah ada koordinasi dengan Korlantas dan bersurat ke Korlantas setiap kecelakaan karena kelebihan muatan itu dikenakan pada pengusahnya hukumannya, supir itu hanya orang itu yang disuruh saja. Itu sudah dijalankan Korlantas bahwa setiap kendaraan terlibat kecelakaan karena ODOL, pengusaha barang wajib dikenakan pidana juga," kata Hendro.

Pertimbangkan Sektor Ekonomi

Pakar menyarankan agar aturan soal ODOL juga memasukkan pertimbangan ekonomi.

Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti Suripno menyampaikan kebijakan Zero ODOL ini hanya mengacu kepada manajemen keselamatan semata. Selama ini penanggung jawab kebijakan ODOL hanya dilakukan oleh lima pilar.

Pilar pertama yang terkait dengan sistem yang berkeselamatan yang

dibebankan ke Bappenas. Pilar kedua yang terkait jalan yang berkeselamatan penanggungjawabnya adalah Kementerian PUPR. Pilar ketiga yang terkait dengan kendaraan yang berkeselamatan penanggungjawabnya adalah Kementerian Perhubungan. Pilar keempat yang terkait dengan pengguna jalan yang berkeselamatan, penanggungjawabnya adalah Polri. Sedangkan pilar kelima terkait dengan penanganan pasca kecelakaan.

"Sama sekali belum memasukkan pertimbangan ekonomi. Padahal salah satu yang juga menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah keselamatan dan meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan," kata Suripno dalam keterangannya. "Seharusnya ODOL bisa ditangani secara komprehensif. Sasarannya adalah bagaimana meminimalkan dampak ekonomi maupun dampak dengan korban yang diakibatkan ODOL ini," lanjutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei - Juli 2022 juga menyimpulkan banyak yang keberatan jika kebijakan Zero ODOL diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

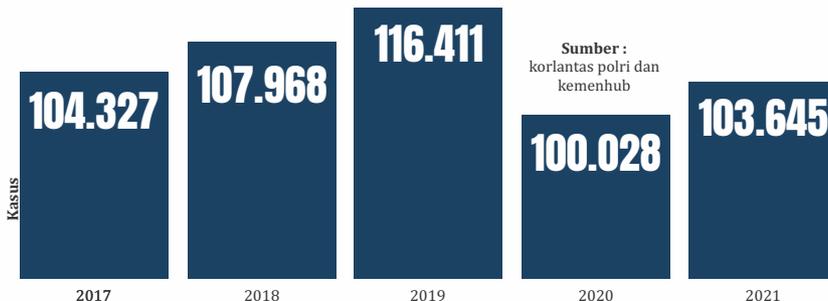
Alasannya, Zero ODOL ini akan membuat biaya angkutan barang akan semakin mahal karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang akan diterima akan semakin menipis.

Hasil survei terhadap 100 orang pemilik armada di PD Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek menunjukkan sebanyak 33% menyatakan tidak setuju Zero ODOL, 31% memberatkan, 28% meminta ditunda, dan hanya 8% yang setuju.

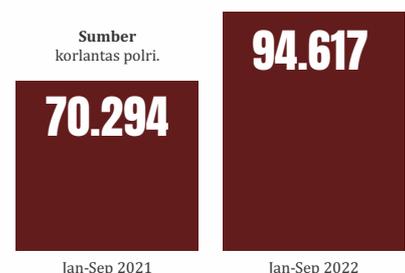
Sementara, hasil survei terhadap 100 pemilik barang di kedua pasar induk ini menunjukkan sebanyak 32% menyatakan Zero ODOL memberatkan, 40% tidak setuju Zero ODOL, 16% meminta ditunda, dan 12% setuju.

Beberapa alasan keberatan para pemilik barang terkait dengan penerapan kebijakan Zero ODOL antara lain biaya angkutan barang akan semakin mahal sehingga keuntungan yang akan diterima pemilik barang akan semakin menipis. Sedang bagi para pedagang, kebijakan Zero ODOL ini dipastikan akan membuat harga barang kirimannya jauh lebih mahal. (wid,ist,rls/dya)

JUMLAH KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA (2017-2021)



JUMLAH KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA PER JAN-SEP (2021-2022)



Cina Tangkapi Para Demonstran, Dikritik Inggris, AS hingga Jerman



Warga Beijing terus melanjutkan aksi memprotes kebijakan nol COVID-19 pemerintah Cina dengan membawakertas putih sebagai simbol perlawanan. (Foto-gettyimage)

BEIJING- Kondisi Cina makin tak kondusif. Otoritas pemerintah tengah mencari para demonstran yang ikut aksi memprotes pembatasan ketat virus Corona (COVID-19). Pengerahan personel kepolisian secara besar-besaran juga dilakukan di beberapa kota untuk mencegah kembali terjadinya unjuk rasa.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (29/11), tiga orang yang menghadiri unjuk rasa di Beijing, yang enggan disebut namanya, menuturkan bahwa otoritas Beijing mulai menyelidiki orang-orang yang ikut unjuk rasa memprotes pembatasan Corona akhir pekan lalu.

Dalam satu kasus, seorang penelepon yang mengidentifikasi dirinya sebagai personel Kepolisian Beijing meminta demonstran untuk mendatangi kantor polisi setempat pada Selasa (29/11) waktu setempat untuk memberikan catatan tertulis soal aktivitas mereka pada Minggu (27/11) malam.

Di kasus lainnya, seorang mahasiswa menuturkan mereka dihubungi pihak kampus kemudian ditanyai apakah mereka berada di area unjuk rasa dan diminta memberikan catatan tertulis soal aktivitas mereka. "Kami semua mati-matian menghapus riwayat obrolan kami," tutur seorang demonstran di Beijing, yang enggan disebut namanya, kepada Reuters.

"Ada terlalu banyak polisi. Para polisi datang untuk memeriksa kartu identitas salah satu teman saya dan membawanya pergi. Kami tidak tahu kenapa. Beberapa jam kemudian mereka melepaskannya," imbuhnya.

Dalam aksi yang masih berlangsung hingga saat ini tersebut, para demonstran kompak mengangkat kertas putih sambil berteriak menyerukan tuntutannya. Dilansir Newsweek, Selasa (29/11), lembaran

kertas putih kosong adalah simbol pembangkangan untuk menentang kebijakan pemerintah yang berkekuatan dengan kebijakan nol-Covid serta mengekang perbedaan pendapat.

Tren kertas putih menjadi populer di kalangan pengunjuk rasa di Hong Kong pada 2020, setelah kota tersebut menerapkan undang-undang keamanan nasional yang samar-samar dan menyeluruh yang disahkan oleh Beijing beberapa hari sebelumnya. Selama akhir pekan, komunitas diaspora Cina di Twitter dan di tempat lain menyebutnya sebagai "Revolusi Kertas Putih", atau "Revolusi Kertas A4", berdasarkan ukuran kertas.

Kertas putih juga mewakili respons ironis terhadap makin berkurangnya ruang ketidaksepakatan di bawah Xi, yang telah membangun aparat keamanan besar yang mencakup jaringan pengawasan di seluruh kota untuk memantau pergerakan offline, dan algoritma komputer yang secara otomatis menyangkal kata-kata sensitif dan gambar viral dari obrolan online. Semua ini membuat aksi kolektif sulit untuk disusun, apalagi diorganisir.

'Era Keemasan' Berakhir

Terpisah, Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menyebut 'era keemasan' hubungan negaranya dengan Cina telah berakhir. Sunak merujuk pada ungkapan mantan Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, pada 2015. 'Era keemasan' menggambarkan hubungan ekonomi yang lebih erat di bawah pemerintahan Osborne.

Tetapi, relasi baik tersebut telah memburuk sejak saat itu. "Mari kita perjelas, apa yang disebut 'era emas' telah berakhir, bersamaan dengan gagasan naif bahwa perdagangan akan mengarah pada reformasi sosial dan politik," tegas Sunak dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya di

London, dikutip dari Reuters, Selasa (29/11).

Pidato tersebut datang ketika ketegangan meningkat antara kedua negara setelah jurnalis BBC yang bekerja di Cina, Ed Lawrence, ditangkap selama meliput protes terhadap kebijakan nol-COVID di Shanghai. Dia mengaku diserang dan ditendang polisi. Sunak tidak hanya menyinggung unjuk rasa di Cina. Dia turut mengacu pada dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, serta pembatasan kebebasan pers di Hong Kong.

Hal senada diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dia mengatakan tersentuh oleh gambar-gambar protes yang terjadi di Cina saat ini. "Kita semua ingat perjuangan kita sendiri melawan virus corona, melawan pandemi, dan kita masih ingat betapa banyak kesulitan yang dihadapi banyak orang di Jerman," kata Steinmeier kepada Rosalia Romaniec dari DW di Istana Bellevue, kediaman resminya di Berlin.

"Kita hanya bisa bertanya-tanya apa beratnya bagi rakyat Cina, di mana langkah-langkahnya jauh lebih ketat dan lebih lama jangkauannya, bahkan hari ini. Jadi saya mengerti mengapa orang ingin menyuarakan ketidakabsabaran dan keluhan mereka di jalanan."

Amerika Serikat juga mendukung hak orang untuk melakukan protes secara damai di China. Hal ini disampaikan oleh Gedung Putih atas aksi pengunjuk rasa di beberapa kota di China telah berdemostrasi menentang tindakan berat COVID-19.

"Kami sudah lama mengatakan setiap orang memiliki hak untuk melakukan protes secara damai, di sini di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Ini termasuk di RRC (Republik Rakyat China)," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat menyatakan fokus pada "apa yang berhasil" untuk memerangi virus corona, termasuk dengan meningkatkan tingkat vaksinasi. "Kami pikir akan sangat sulit bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk dapat menahan virus ini melalui strategi nol-COVID mereka," kata NSC.

Sementara itu, Konsulat Jenderal RI di Shanghai, Cina, mengimbau seluruh warga Indonesia (WNI) yang ada di wilayah itu agar tidak terlibat dalam demonstrasi yang baru-baru ini berlangsung di kota hub finansial Negeri Tirai Bambu.

"Merujuk situasi terkini dari adanya berbagai aksi di Shanghai dan kota lainnya, sebagaimana himbuan sebelumnya, bersama ini KJRI Shanghai mengimbau kepada seluruh

WNI khusus yang berada pada wilayah kerja KJRI[...] untuk tidak ikut serta/terlibat/berada pada aksi/protes warga setempat terkait situasi pandemi atau isu-isu domestik Tiongkok lainnya," bunyi imbauan KJRI Shanghai. Selain itu, KJRI Shanghai juga mengimbau WNI untuk tetap tertib menerapkan protokol kesehatan dimana pun berada. (Reuters, Newsweek, ist/dya)

KEBIJAKAN TAK BIASA XI JINPING

1. Melarang Penayangan Winnie the Pooh

Pemerintah Cina melarang perilsan film Christopher Robin, yang merupakan adaptasi cerita Winnie the Pooh pada 2018. Seperti dilansir The Guardian, Winnie the Pooh sempat dijadikan alat bagi masyarakat Cina untuk mengejek Xi Jinping.

2. Larang 'Bangunan Aneh'

Pemerintahan Xi Jinping juga diketahui melarang 'bangunan aneh' di Cina. Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional sempat mendeklarasikan bahwa "konstruksi arsitektur jelek harus secara ketat dilarang."

3. Bekukan Puluhan Akun K-Pop

Platform media sosial Cina, Weibo, sempat membekukan penggunaan 21 akun penggemar sejumlah artis, termasuk K-pop, pada 2021.

4. Membatasi 'Citra Dunia Hiburan

Cina mengatur citra artis yang tampil di televisi. Pemilihan aktor dan selebritas dalam sebuah acara atau program harus diatur dan dikendalikan secara hati-hati, mengikuti aturan politik dan moral.

5. Pernah Larang Huruf 'N'

Pemerintah Cina sempat melarang penggunaan huruf 'N' pada 2018. Pelarangan ini terjadi kala kabar terkait kemungkinan pembatasan masa jabatan Xi Jinping dicabut. Selain itu, kata-kata seperti "keabadian" dan "naik takhta" juga dinilai sebagai kata-kata yang tak sesuai digunakan di internet.

